MUHAMAD IQBAL
ARIA DIMAS HARAPAN

HUKUM PIDANA KHUSUS

GRATIFIKASI DALAM SKEMA
PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA

**HUKUM PIDANA KHUSUS GRATIFIKASI
DALAM SKEMA PERDAGANGAN
ORGAN TUBUH MANUSIA**

**MUHAMAD IQBAL
ARIA DIMAS HARAPAN**

pena persada

PENERBIT CV. PENA PERSADA

**HUKUM PIDANA KHUSUS GRATIFIKASI
DALAM SKEMA PERDAGANGAN
ORGAN TUBUH MANUSIA**

Penulis:

Muhamad Iqbal
Aria Dimas Harapan

ISBN : 978-623-315-775-9

Editor:

Wiwit Kurniawan

Design Cover :

Retnani Nur Brilliant

Layout :

Nofendy Ardyanto

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi :

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email : penerbit.penapersada@gmail.com

Website : penapersada.com Phone : (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunianya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“HUKUM PIDANA KHUSUS GRATIFIKASI DALAM SKEMA PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Dalam buku ini membahas tentang hukum pidana khusus gratifikasi dalam skema perdagangan organ tubuh manusia. Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terbelenggu pada kesenjangan ekonomi yang mendera rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus dimana masyarakat yang secara sukarela menjual organ tubuhnya demi mendapatkan uang dengan nominal tertentu. Perkembangan teknologi khususnya di bidang kesehatan mengalami kemajuan yang begitu pesat, khususnya dalam upaya mencari metode pengobatan atas beberapa jenis penyakit. Salah satunya adalah upaya pengobatan yang tergolong baru yakni pencangkokan organ tubuh (*Transplantasi*) untuk beberapa organ tubuh seperti ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Namun kemajuan teknologi di bidang kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan kemajuan dalam hal sistem hukum terutama hukum mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan kemampuan para Tenaga Kesehatan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Allah Swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kasus <i>Transplantasi</i> di Indonesia	1
B. Modus Jual Beli Organ Tubuh Manusia	3
C. Peran Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Organ Tubuh.....	7
BAB II TINDAK PIDANA GRATIFIKASI.....	12
A. Latar Belakang Tindak Pidana dan Kejahatan Korupsi	12
B. Gratifikasi Dan Upaya Penanggulangan Korupsi.	20
C. Pengertian Suap dan Gratifikasi.	23
D. Rumusan Tindak Pidana Gratifikasi.	24
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Gratifikasi.....	27
BAB III TRANSPLANTASI ILEGAL YANG BERASAL DARI PERDAGANGAN ORGAN DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA.....	29
A. Pengadaan Legal Organ Tubuh Manusia	29
B. Peraturan PerUndang-undangan Mengenai Transplantasi Organ atau Jaringan Tubuh Manusia dan Donor Organ Tubuh Serta Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia.	30
C. Transplantasi Ilegal Sebagai Hasil Dari Perdagangan Organ dan atau Jaringan Tubuh Manusia.	38
D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Bisnis Ilegal Perdagangan Organ Tubuh Manusia yang Berujung Pada Transplantasi Ilegal.....	42
E. Sanksi Hukum Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	50
1. Pengaturan <i>Transplantasi</i> dan Sanksi Hukum Atas Perdagangan Organ Tubuh Manusia Di Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.	51

2. Pengaturan Transplantasi dan larangan Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1981.....	53
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG TERJADINYA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA.....	57
A. Faktor-Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Maraknya Bisnis Ilegal Perdagangan Organ Tubuh Manusia.	64
B. Faktor-Faktor Internal Yang Menyebabkan Maraknya Bisnis Ilegal Perdagangan Organ Tubuh Manusia.....	72
BAB V EFEKTIFITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009	74
A. <i>Gratifikasi</i> Sebagai Bentuk Korupsi Yang Turut Memicu Tumbuh Suburnya Mafia Perdagangan Organ Tubuh Manusia.....	74
B. Sanksi Hukum Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 Dalam Menjerat Pelaku Perdagangan Organ Tubuh Manusia.....	79
C. Keterkaitan Tindak Pidana Gratifikasi sebagai Kejahatan Yang Memicu Terjadinya Kejahatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia.	84
D. Hambatan Aparat Penegak Hukum Dalam Upaya Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan mafia perdagangan organ tubuh manusia serta Pertanggungjawaban Pelaku yang Terlibat Dalam Praktik Perdagangan Organ Tubuh Manusia dan Transplantasi Ilegal.	90
BAB VI PENUTUP	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
TENTANG PENULIS	109

**HUKUM PIDANA KHUSUS GRATIFIKASI
DALAM SKEMA PERDAGANGAN
ORGAN TUBUH MANUSIA**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kasus *Transplantasi* di Indonesia

Indonesia sebagai Negara hukum yang berasaskan pancasila yang melindungi seluruh warga negara Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Sebagai negara hukum maka sudah selayaknya jika hukum dijadikan supremasi di Indonesia, dimana seluruh orang yang ada di wilayah Indonesia diwajibkan tunduk dan patuh tanpa kecuali. Hal tersebut amat dimungkinkan jika tersedia perangkat hukum yang cukup untuk mengatur seluruh sektor kehidupan, dalam hal ini diantaranya adalah hukum yang mengatur aktivitas dari Tenaga Kesehatan, oleh karena itu maka perlu diciptakan perangkat hukum yang akan menentukan pola aktivitas pada Tenaga Kesehatan.

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih terbelenggu pada kesenjangan ekonomi yang mendera rakyatnya, hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus dimana masyarakat yang secara sukarela menjual organ tubuhnya demi mendapatkan uang dengan nominal tertentu. Seperti yang terjadi pada bulan januari 2016, publik indonesia digemparkan dengan dugaan praktik perdagangan organ tubuh manusia di lingkungan RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo). Hal tersebut tentunya membuka asumsi baru bahwa dalam upaya mendukung kegiatan jual-beli organ tubuh manusia, sindikat perdagangan organ tubuh manusia telah menyasar kalangan profesional medis dalam hal ini oknum Tenaga Kesehatan sebagai yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam rumah sakit yang memiliki fasilitas dalam hal *transplantasi* organ tubuh manusia.

Dari fenomena tersebut jika kita fikirkan ternyata memang masuk akal, mengingat dalam hal mengambil organ tubuh manusia tersebut bukan perkara sembarangan

melainkan membutuhkan pengetahuan khusus (*Specialist*), mengingat hal tersebut sangatlah penting guna menjaga kualitas dan nilai jual organ itu sendiri, oleh karenanya sudah tentu mafia jual beli organ tubuh akan menjalin hubungan saling menguntungkan dengan oknum dokter yang memiliki pengetahuan atas organ tubuh dan memiliki akses atas fasilitas *transplantasi* tersebut.

Sebelumnya penulis menyadari perkembangan teknologi khususnya di bidang kesehatan mengalami kemajuan yang begitu pesat, khususnya dalam upaya mencari metode pengobatan atas beberapa jenis penyakit. Salah satunya adalah upaya pengobatan yang tergolong baru yakni pencangkokan organ tubuh (*Transplantasi*) untuk beberapa organ tubuh seperti ginjal, hati, paru-paru, dan tulang. Namun kemajuan teknologi di bidang kesehatan tersebut tidak diimbangi dengan kemajuan dalam hal sistem hukum terutama hukum mengatur secara khusus mengenai penyalahgunaan kemampuan para Tenaga Kesehatan dalam hal ini dokter spesialis bedah dan oknum Tenaga Kesehatan rumah sakit yang terlibat langsung dalam kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Kekosongan hukum yang terlihat jelas atas regulasi yang mengawasi kegiatan *transplantasi* seringkali dimanfaatkan beberapa oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Hal tersebut ditambah dengan banyaknya fakta dilapangan banyak sekali masyarakat yang rela menjualkan organ tubuhnya melalui perantara calo (oknum lapangan dalam sindikat perdagangan organ tubuh manusia atau pendonor organ tubuh sebelumnya) karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup. Dengan prinsip bagi hasil walaupun tidak jarang calo organ tubuh manusia tersebut justru dalam pembagian keuntungan dalam penjualan organ tubuh, pemberi organ (*donor*) mendapatkan pembagian hasil yang lebih sedikit dan tentu tidak sesuai dengan perjanjian awal atau bahkan dalam beberapa kasus pemberi organ (*donor*) tersebut ditinggalkan kabur oleh para calo organ tubuh manusia tersebut tanpa ada pembagian.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengumumkan fatwa tentang *transplantasi* organ tubuh manusia yang difatwakan pada tahun 1950, di dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa *transplantasi* organ tubuh manusia diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau haram adalah jual beli organ tubuh. Sebenarnya seseorang tidak berhak memberikan organ tubuh miliknya, organ tersebut bukan milik pribadi, dan tidak dibeli. Manusia hanya diamanati oleh Sang Pencipta untuk menjaganya. Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak dikomersialisasikan. Pengaturan *transplantasi* harus diatur oleh negara agar tidak disalah gunakan.¹

B. Modus Jual Beli Organ Tubuh Manusia

Seringkali para calo organ tubuh manusia menyasar daerah-daerah miskin ,dikarenakan disanalah dengan mudah para calo organ tubuh manusia mengelabui para korbannya dengan diiming-iming uang dengan nominal tertentu. Kejahatan semacam ini telah berkembang di dunia dari semenjak kesuksesan *transplantasi* yang pertama kali berupa ginjal dari donor kepada pasien donor ginjal pada tahun 1954, perkembangan di bidang *transplantasi* yang semakin maju pesat kenyataannya tidak diimbangi dengan kemudahan pelayanan kesehatannya yang hanya bisa diakses kalangan berada kala itu dan hal tersebut terjadi hingga saat ini. Selain faktor ekonomi fakta tingginya tingkat penyakit gagal organ di seluruh dunia yang mempengaruhi tingkat kebutuhan atas organ tubuh tersebut justru menjadi meningkat, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengkomersialisasikan praktik jual beli organ tubuh manusia.

Seperti dikutip dari jurnal Medical Update “ *Turisme Transplantasi Organ*” Agustus tahun 2007, sudah menjadi kesepakatan dunia Internasional bahwa organ tubuh manusia

¹Fatwa MUI Tentang *Transplantasi* Organ Tubuh, diunduh tanggal 26 Februari 2016.

dilarang diperjualbelikan, walaupun biaya operasi sangat mahal sehingga tidak semua orang mampu membayar. Ketidakmampuan dalam menyediakan stock organ tubuh akan berpotensi mengakibatkan penjualan organ tubuh yang sudah pasti hal itu ilegal, dalam arti orang miskin menjualkan organ tubuhnya kepada orang kaya akan terus berlangsung.²

Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan pernah melansir dugaan praktek jual-beli bayi untuk dimanfaatkan organ tubuhnya. Bayi-bayi itu dijual Rp 3 juta-Rp 5 juta. Oleh pembeli, bayi-bayi tersebut dipelihara hingga berusia tujuh tahun. Setelah beranjak remaja, kemudian mereka dibunuh dan organnya dijual hingga ratusan juta rupiah. Dua warga negara Indonesia, Sulaiman Damanik dan Toni, diadili di Singapura karena kedapatan menjual belikan organ tubuh mereka. Sulaiman dan Toni menjual ginjal mereka kepada Tang Wee Sung, seorang Kepala Eksekutif Perusahaan Tang, sebuah jaringan supermarket besar di Singapura, seharga S\$ 16.290 atau Rp 150 juta. Transaksi itu batal karena tertangkap oleh aparat.³

Perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah melalui perangkat hukum yang berlaku merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan, tidak ada artinya kata-kata “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah” jika ternyata masih ada penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa ketimpangan-ketimpangan hak-hak ekonomi yang mencerminkan ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴ Di mana ketidaksejahteraan tersebut didorong dan diciptakan oleh sistem pemerintahan yang tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena masih membiarkan adanya praktek-praktek pemerintahan dimana kekuasaan

²Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, (Bandung : Penerbit CV.Mandar Maju, 2012), hlm.68.

³http://wap.gatra.com/versi_cetak.php?id=120613, M.Agung Riyadi dan Rach Alid Bahaweres, *Ketika Organ Tubuh Diperdagangkan*, hlm. 1, diakses pada tanggal 29 Oktober 2014.

⁴Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009:74

dijalankan secara sewenang-wenang dan tidak berpihak pada rakyat.

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dr. Kartono Mohamad mengatakan Celah bagi para dokter dapat terlibat dalam jual-beli organ. Celah keterlibatan adalah jika dokter menginformasikan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan, seperti calo/broker, bahwa ada pasien kaya yang membutuhkan organ tertentu. Sebagai tenaga profesional dokter seharusnya hanya bertugas untuk melakukan transplantasi sesuai yang diamanatkan Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan tidak perlu terlibat dalam praktik semacam yang tidak diatur bahkan dilarang dalam Undang-undang tsb. Untuk mencegah terjadinya praktik jual-beli organ, perlunya ada mekanisme kontrol yang berjalan dengan baik. Kontrol itu harus dimulai dengan keterbukaan informasi di koperasi pencangkokan organ. Harus ada penjelasan dari mana organ-organ yang tersedia itu bisa didapatkan. Sebab, hingga saat ini tak pernah ada penjelasan ihwal cara mendapatkan organ-organ yang bisa dicangkok di rumah sakit. Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan harus aktif melakukan pengawasan. Ia memandang perlunya keterlibatan Kemenkes dalam memantau penyediaan organ untuk di cangkok di rumah sakit. Sebab, menurutnya jika tidak ada pengawasan maka praktik memilukan penjualan organ bisa saja terus terjadi. Polisi juga bisa saja dilibatkan. Kalau ada indikasi jual-beli organ yang memang melanggar aturan, aparat bisa menindak pelaku.⁵

Beberapa media *online* banyak memuat berita mengenai perdagangan organ tubuh namun hal ini seperti menjadi pemandangan yang lumrah. Permasalahan yang seakan memperparah ialah tidak ada satupun kasus perdagangan organ tubuh hingga saat ini yang mampu sampai pada tingkat pengadilan padahal telah banyak oknum yang melakukannya

⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56b46f77ec4e4/ada-celah-dokter-terlibat-dalam-praktik-jual-beli-organ>, diakses pada tanggal 23 Mei 2016.

secara terang-terangan hingga saat ini kasus perdagangan organ tubuh manusia yang melibatkan tiga oknum dokter disalah satu rumah sakit terkenal di Indonesia, berita mengenai hal tersebut pun kini sudah mulai hilang tertutup isu-isu baru lain. Anomali tersebut seakan menguatkan logika kita bahwa hukum ataupun kemampuan aparat penegak hukum belum mampu menembus sisi gelap praktik ilegal perdagangan organ tubuh manusia terutama dalam dunia kesehatan. Modus perdagangan organ tubuh lain yang lebih kejam ialah terjadinya pembunuhan yang mana sebelum korbannya dibunuh organ tubuhnya diambil terlebih dahulu untuk diperjual belikan. Seperti contoh dalam kasus ditemukan organ tubuh di puskesmas yang diduga organ tubuh yang akan diperdagangkan oleh sindikat perdagangan organ tubuh. Organ tubuh tersebut diduga milik korban yang dimutilasi terlebih dahulu sebelum organ tubuhnya diambil.⁶

Maka dari beberapa fenomena tersebut kita bisa katakan bahwa Modus jual beli organ tubuh manusia ini sangat beragam, yakni :1) Menjual organ tubuh karena terdesak kebutuhan ekonomi, ada pula yang dilakukan dengan cara menipu sang donor, 2) Menjual organ tubuh manusia melalui jasa Tenaga Kesehatan sebagai perantara penjualan organ, 3) Ada kasus pembunuhan dengan tujuan mengambil organ tubuh korban kemudian dijual, 4) Adanya motif pencurian organ tubuh lewat adopsi, 5) Bahkan ada juga yang lewat jalur perdagangan manusia dengan membujuk anak-anak untuk bekerja di luar negeri secara ilegal, padahal sudah masuk dalam sindikat penjualan organ tubuh dan dari semua modus itu tentunya akhirnya akan membutuhkan jasa seseorang yang memiliki keahlian dalam anatomi tubuh manusia.

⁶<http://www.Republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/10/mug84-sindikat-penipuan-penjualan-organ-tubuh-manusia-intai-riau> judul Artikel: *Sindikat Penjualan Organ Tubuh Manusia Intai Riau*, Diakses Pada 27 Oktober 2014.

C. Peran Hukum Terhadap Kasus Perdagangan Organ Tubuh

Sebenarnya di Indonesia terdapat beberapa perangkat hukum yang bisa di pergunakan untuk menjerat mafia perdagangan organ tubuh manusia terutama yang berasal dari oknum-oknum mafia yang berasal dari dunia kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (1) menyebutkan, “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui *transplantasi* organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca”. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (2) menyebutkan, “*Transplantasi* organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan”. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 64 ayat (3) menyebutkan, “Organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.” Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 192 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Patut kita ketahui bentuk perdagangan organ tubuh manusia tidak lepas dari serangkaian-serangkaian upaya memisahkan organ tubuh tersebut dari tubuh pendonor dengan benar guna menjaga kualitas organ tubuh tersebut, dengan kata lain membutuhkan keterampilan-keterampilan dan fasilitas juga alat-alat bedah kedokteran. Oleh karenanya terdapat potensi Gratifikasi dalam hubungan terlarang antara Oknum Dokter, Tenaga Kesehatan yang menjadi calo pengadaan organ tubuh manusia dan Pasien yang membutuhkan organ tubuh manusia dengan segera dalam kondisi minim stock organ di Rumah Sakit tersebut. Dalam pasal 12 B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai Gratifikasi untuk oknum-oknum Tenaga Kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas dan alat-alat kesehatan Rumah Sakit serta kemampuan secara salah, yakni:

Pasal 12 B ayat (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Fenomena gratifikasi dalam bisnis pengadaan organ yang berujung pada perdagangan organ tubuh manusia di dunia kesehatan memang seperti gunung es, yakni maraknya kasus yang dipandang di dalamnya terdapat indikasi gratifikasi dalam bisnis pengadaan organ yang berujung pada perdagangan organ tubuh manusia namun yang muncul dipermukaan hanya sangat sedikit. Contoh kata Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Umar Surya Fana, di Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu (27/1/2016). Seperti dilansir di media online. Menurut nya ada tiga rumah sakit yang diduga menjadi tempat dilakukannya operasi transplantasi ginjal terkait kasus tersebut. "Tiga rumah sakit di Jakarta, RS swasta dan negeri," katanya. Umar mengatakan bahwa pihak korban, perekrut dan rumah sakit menjalankan aksinya secara terorganisir dalam sebuah jaringan tertutup. Tujuh korban dalam kasus ini yakni HLL, IS, AK, SU, JJ, DS dan SN. Umar mengatakan bahwa para korban tersebut umumnya berasal dari kalangan menengah kebawah. Para korban, kata dia, diberi imbalan antara Rp70 juta - Rp 90 juta bila bersedia mendonorkan ginjal mereka. Sementara tiga

tersangka dalam kasus tersebut yang berhasil dibekuk Bareskrim adalah HS, AG dan DD. HS ditangkap polisi di Jakarta. Sementara AG dan DD diringkus di Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, HS berperan sebagai penghubung ke rumah sakit. "AG dan DD berperan merekrut pendonor (korban)," katanya. Umar menjelaskan, HS menginstruksikan AG dan DD untuk mencari korban pendonor ginjal. Ia mengatakan, dalam kasus ini, penerima ginjal dikenakan biaya Rp 225 juta - Rp300 juta untuk pembelian satu ginjal dengan uang muka sebesar Rp10 juta - Rp15 juta. "Sisa pembayaran dilakukan setelah operasi transplantasi dilakukan," katanya. Biaya tersebut, menurutnya, tidak termasuk biaya operasi transplantasi yang harus ditanggung oleh penerima ginjal. Dalam kasus ini, HS meraup keuntungan Rp100 juta-Rp110 juta untuk setiap korban yang mau mendonorkan ginjalnya. Sementara AG mendapat bayaran Rp5 juta-Rp7,5 juta setiap mendapatkan pendonor. Sedangkan DD mendapatkan upah Rp10 juta - Rp15 juta. Atas perbuatannya, tersangka HS, AG dan DD dijerat dengan Pasal 64 Ayat 3 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang isinya "Organ dan atau Jaringan Tubuh Dilarang Diperjualbelikan dengan Dalih Apapun".⁷

Perumusan pasal 12 B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebenarnya menunjukkan kegigihan pemerintah dalam usaha menjerat pelaku tindak pidana korupsi di dunia kesehatan yang dilakukan dengan berbagai macam modus tetapi sangat disayangkan masih ada beberapa kelemahan dalam rumusan pasal 12 B tersebut. Salah satu yang dapat dikatakan menjadi kelemahan dalam pasal 12 B adalah tidak dijelaskan secara rinci mengenai arti kata "barang" dalam pasal ini. Seperti yang diketahui ada berbagai macam yang dapat dikategorikan sebagai suatu "barang" yaitu barang bergerak atau tidak

⁷<http://matatelinga.com/view/Nasional/37678/Polisi-Incar-Oknum-Dokter-yang-Diduga-Terlibat-Sindikatan-Penjual-Ginjal.html#.V0vvhTWLQdU>, Diakses Pada 30 Oktober 2014.

bergerak ataupun barang yang berwujud maupun tidak berwujud.

Banyaknya kasus perdagangan organ tubuh manusia yang sudah mengarah atas keterlibatan oknum Tenaga Kesehatan yang berperan menjadi calo pengadaan organ tubuh manusia membuat permasalahan ini harus dibahas dalam ranah hukum secara serius, bukan sekedar dalam ranah etik. Aturan hukum bersifat khusus yang disertai sanksi tegas amat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan organ tubuh tersebut karena oknum-oknum pelaku utama yang terlibat dalam kejahatan ini adalah pihak yang cerdas dalam hal anatomi tubuh manusia. Hal ini berguna dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak asasi manusia terutama mengenai hak untuk hidup Pasal 28 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut pula kejahatan tentang perdagangan organ tubuh tersebut amat cocok masuk di ranah hukum pidana. Pengaturan tentang *transplantasi* organ tubuh di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 64-65 mengenai *transplantasi* organ tubuh. Berkaitan praktik jual beli organ tubuh secara khusus diatur dalam Undang-undang yang sama dalam Pasal 64 ayat (3) yang berisi :

“organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun”.

Di Indonesia, pengambilan organ dari donor yang telah meninggal bukan perkara mudah. Organ harus diambil ketika seorang telah mengalami kematian batang otak, biasanya hanya terjadi selama *interval* waktu 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) menit sebelum jantung benar-benar berhenti berdetak. Jika proses pengambilan organ terlambat atau jantung sudah terlanjur berhenti berdetak, maka organ tubuh tersebut tidak dapat dipakai lagi, meskipun secara fisik terlihat kondisinya baik, aspek-aspek tersebutlah yang meyakinkan penulis jika kejahatan seperti perdagangan organ tubuh manusia adalah

kejahatan spesialis, karena dalam menjalankan aktivitas tersebut baik secara legal ataupun ilegal tetap membutuhkan kontribusi tangan Tenaga Kesehatan yang ahli dalam bidang anatomi dan bedah guna menjaga kualitas organ tubuh tersebut.

Penderita atau keluarga penderita gagal organ secara kreatif mencari cara untuk mendapatkan donor dengan bermacam-macam cara, antara lain membuat permintaan secara pribadi di media cetak atau media elektronik (seperti dalam kasus di Desa Cikoleang wilayah Kecamatan Rumpin Bogor, di dekat kediaman penulis, dimana dalam kasus tersebut orang tua dari murid yang ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah, demi menebus biaya ijazah anak-anaknya mereka rela menjual salah satu organ ginjalnya dengan menyuarakan hal tersebut di depan wartawan media cetak lokal yang meliput berlangsungnya demo tersebut), mendaftarkan atau melakukan registrasi pilihan yang berhubungan dengan *transplantasi* bahkan mengirim surat kepada teman-temannya atau siapa saja melalui email, dan ada pula yang langsung mendatangi tempat *medical tourist* dengan harapan segera mendapatkan donor dan imbalannya.⁸

Peraturan tentang *transplantasi* organ tubuh di Indonesia sudah tertera di Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan mengenai *gratifikasi* berada di pasal 12B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adanya peraturan terkait *transplantasi* dan *gratifikasi*, sedangkan belum ada kasus perdagangan organ tubuh yang dilakukan oleh oknum tenaga medis belum ada yang sampai ke pengadilan, sangat berkaitan erat dengan pembangunan dan penegakan hukum.

⁸*Ibid*, hlm.2-4.

BAB II

TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

A. Latar Belakang Tindak Pidana dan Kejahatan Korupsi

Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.⁹ Tindak pidana tersebut di dalam KUHP tidak dirumuskan secara tegas, akan tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak pidananya, namun dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan, semisal dalam konsep Pasal 11 dalam KUHP yang menyatakan :

1. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Dalam hal penempatan kesadaran di masyarakat sebagai salah satu sifat melawan hukum, yaitu hukum tidak tertulis (Unwritten Law) merupakan jembatan hukum yang berguna dalam hal penggunaan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan dapat menjangkau pada keadilan substantif, terlebih dari hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, dimana korupsi merupakan hal yang sangat dibenci oleh masyarakat.

⁹Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2009), hlm.49.

Penempatan sifat melawan hukum materiel tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, karena menurut **Muladi** tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun masyarakat.¹⁰ Berdasarkan kajian etimologis tindak pidana berasal dari kata "*strafbaar feit*" di mana arti kata ini menurut **Simons** adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹ Rumusan tersebut menurut **Jonkers** dan **Utrecht** merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum,
2. Bertentangan dengan hukum,
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah,
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.¹²

Mengenai pengertian "*Straftbaar feit*" tersebut Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat, 52 hal mana juga disetujui oleh **C.S.T. Kansil** dan **Christine S.T. Kansil** karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.¹³

Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah "*strafbaar feit*" diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴ Sedangkan **Komariah E. Sapardjaja** menggunakan istilah Tindak Pidana

¹⁰Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 61.

¹¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 56.

¹²Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88.

¹³C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 37.

¹⁴Moeljatno, *op.cit.* hlm. 54.